

TUGAS AKHIR

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT* DI INDONESIA**

Oleh:

DIMAS WAHYU PRATAMA
NIM : 201910110311386



UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

TUGAS AKHIR

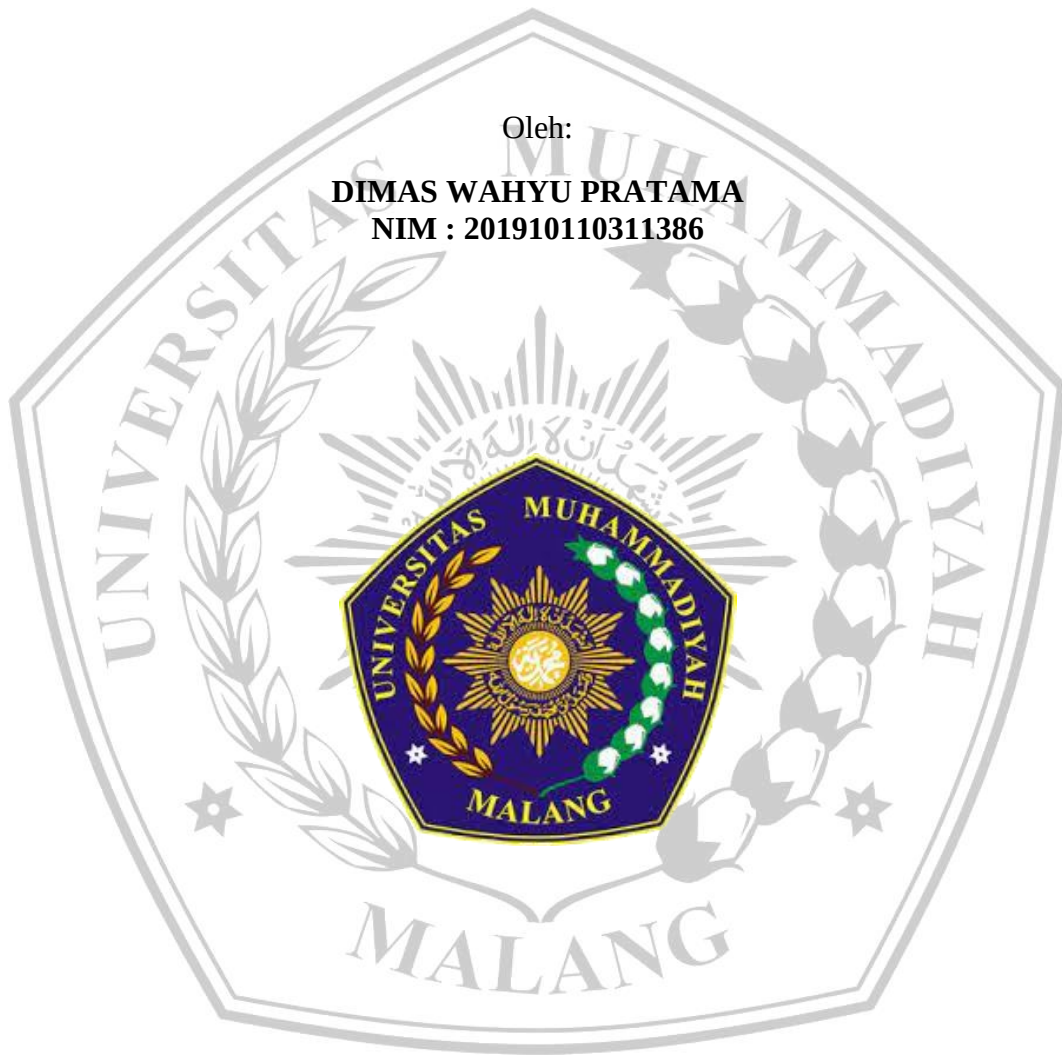
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT* DI INDONESIA

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum

Oleh:

DIMAS WAHYU PRATAMA

NIM : 201910110311386



UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:

DIMAS WAHYU PRATAMA

201910110311386

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 17 April 2023

Pembimbing Utama,


Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

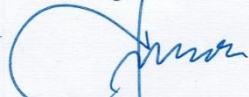
Pembimbing Pendamping,


Fitria Esfandiari, SH., M.H.



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DIMAS WAHYU PRATAMA

201910110311386

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 17 April 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

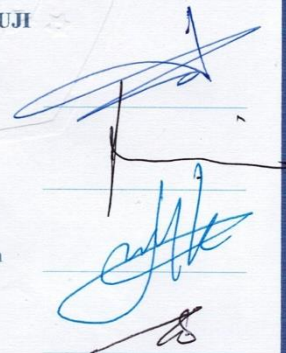
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIMAS WAHYU PRATAMA

NIM : 201910110311386

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DI INDONESIA

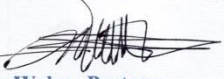
Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



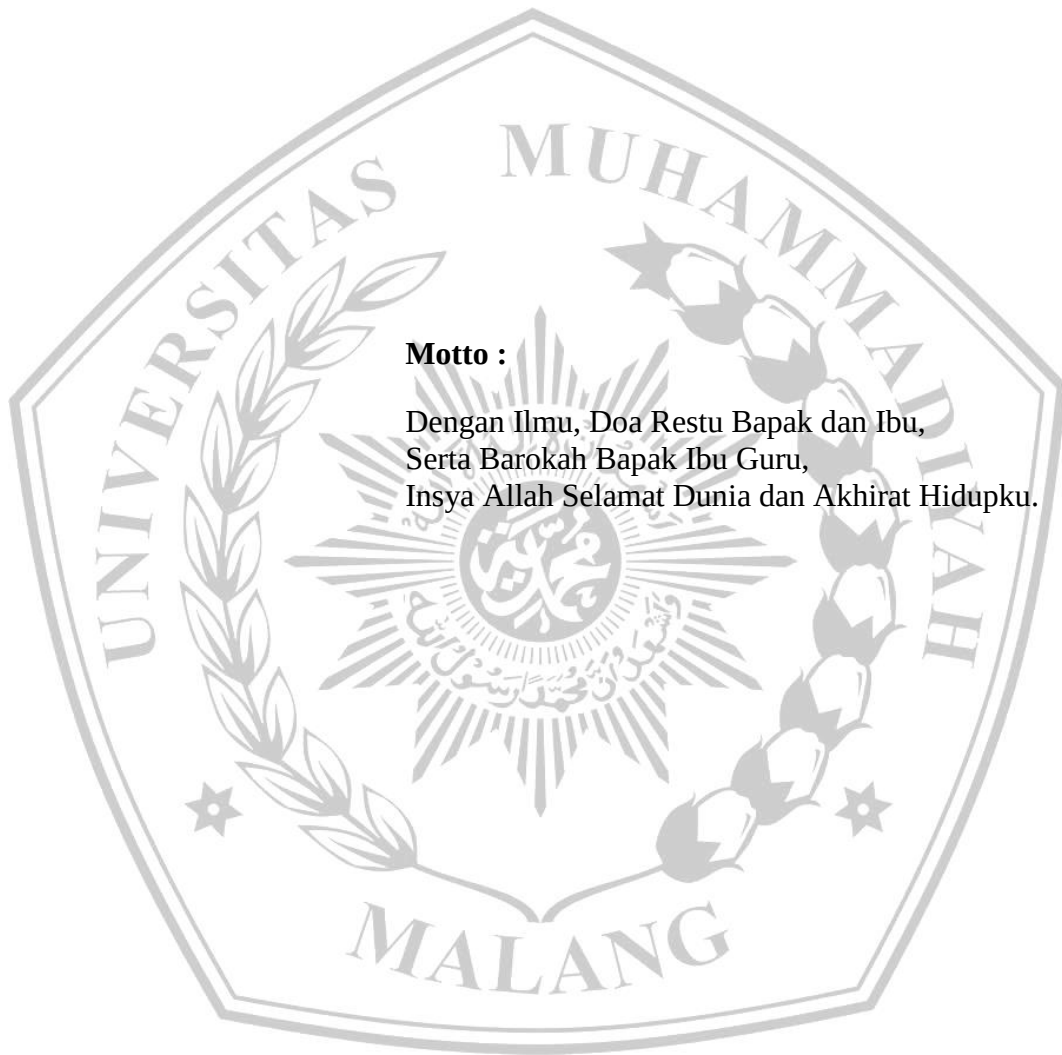
Malang, 18 September 2023


Dimas Wahyu Pratama

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Saya adalah manusia paling beruntung di dunia
karena saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk
melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi



Motto :

Dengan Ilmu, Doa Restu Bapak dan Ibu,
Serta Barokah Bapak Ibu Guru,
Insya Allah Selamat Dunia dan Akhirat Hidupku.

ABSTRAKSI

Nama : Dimas Wahyu Pratama
NIM : 201910110311386
**Judul : Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Gugatan *Citizen Lawsuit* Di Indonesia.**
**Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum.
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.**

Citizen Lawsuit merupakan akses bagi warga negara untuk mewakili kepentingan umum guna mengajukan gugatan di pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Sejak diterimanya gugatan *Citizen Lawsuit* yang diajukan oleh Munir C.S. atas dasar penelantaran TKI di Nunukan oleh Pemerintah Indonesia, hingga sekarang belum ada peraturan tentang *Citizen Lawsuit*. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, apa urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia, *kedua*, bagaimana bentuk peraturan perundang-undangan tentang gugatan *Citizen Lawsuit* yang ideal diterapkan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengupayakan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang gugatan *Citizen Lawsuit*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah, kondisi kekosongan hukum tentang *Citizen Lawsuit* mengakibatkan terjadinya inkonsistensi Majelis Hakim dalam menafsirkan syarat formil yaitu notifikasi, sehingga perlu dibuat peraturan perundang-undangan tentang gugatan *Citizen Lawsuit* guna mengejar ketertinggalan hukum tertulis dan mencegah inkonsistensi putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menerima gugatan *Citizen Lawsuit* berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, idealnya konsep *Citizen Lawsuit* diakomodir dalam KUHPerdara, dengan memasukkan beberapa klausul seperti ruang lingkup perkara, pihak-pihak yang menjadi Penggugat dan Tergugat, alasan diajukannya gugatan, dan pengaturan tentang notifikasi *Citizen Lawsuit*. Saran penelitian ini, perlu dilakukan upaya pembentukan peraturan tentang gugatan *Citizen Lawsuit* dalam bentuk undang-undang, dan perlu dilakukan penelitian model gugatan *Citizen Lawsuit* di negara-negara *Anglo Saxon* untuk dijadikan bahan referensi dalam membentuk peraturan *Citizen Lawsuit*.

Kata kunci: **Urgensi, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Gugatan *Citizen Lawsuit*.**

ABSTRACT

Name : Dimas Wahyu Pratama
NIM : 201910110311386
Title : *The Urgency of The Formation of Legislation on Citizen Lawsuit in Indonesia.*
Adviser : *Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum.*
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Citizen Lawsuit is access for citizens to represent the public interest to file a lawsuit in court based on unlawful acts by the government. Since receiving the Citizen Lawsuit lawsuit filed by Munir C.S. Based on the neglect of TKI in Nunukan by the Indonesian Government, until now there has been no regulation regarding Citizen Lawsuit. The formulation of the problem used in this research is first, what is the urgency of forming legislation regarding Citizen Lawsuit lawsuits in Indonesia, and second, what form of legislation regarding Citizen Lawsuit lawsuits should ideally be implemented in Indonesia. The purpose of this research is to seek the formation of statutory regulations regarding Citizen Lawsuit lawsuits. The research method used is juridical-normative research. The results of this research are that the legal vacuum regarding Citizen Lawsuits has resulted in inconsistencies in the Panel of Judges in interpreting formal requirements, namely notifications so it is necessary to create statutory regulations regarding Citizen Lawsuit lawsuits to catch up with written law and prevent inconsistencies in court decisions. The conclusion of this research is the legal basis used by the Panel of Judges in accepting the Citizen Lawsuit lawsuit based on Article 10 paragraph (1) and Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Furthermore, ideally, the concept of Citizen Lawsuit is accommodated in the Civil Code, by including several clauses such as the scope of the case, the parties who are Plaintiffs and Defendants, the reasons for filing the lawsuit, and regulations regarding Citizen Lawsuit notifications. This research suggests that it is necessary to make efforts to form regulations regarding Citizen Lawsuit lawsuits in the form of laws, and it is necessary to research models of Citizen Lawsuit lawsuits in Anglo-Saxon countries to be used as reference material in forming Citizen Lawsuit regulations.

Keywords: *Urgency, Formation of Legislation, Citizen Lawsuit.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya. Tak lupa penulis juga melanturkan shalawat dan salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul: “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia”, yang dalam hal ini tugas tersebut sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum.

Penulis menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan pada proses penulisan tugas akhir ini, namun berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan, dorongan motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak menjadikan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Selesaiannya tugas akhir ini merupakan salah satu kebahagiaan bagi penulis, karena bagaimanapun skripsi adalah salah satu kewajiban yang harus dijalankan bagi seorang mahasiswa jika ingin menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar kesarjanaan.

Untuk itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya, dan menjawab serta mengabulkan segala doa-doa baik dalam kelancaran penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kepada Bapak juara 1 dunia, Alm. Purwanto, serta Ibu terbaik di dunia yaitu Siti Ruba'iyah yang telah bekerja keras untuk membiayai kuliah penulis dan senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan, pengarahan dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
3. Kepada Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya sebagai Akademisi Hukum untuk membimbing penulis hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
4. Kepada Fitria Esfandiari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya sebagai Akademisi Hukum untuk membimbing penulis hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
5. Kepada kekasih penulis Anggun Atma Dhadhilia, S.H., yang akan menjadi istri penulis, terimakasih telah memberikan dukungan penuh baik dukungan moral maupun moril kepada penulis dalam proses kepenulisan tugas akhir ini. Terimakasih juga telah menjadi teman diskusi penulis

dalam memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kepenulisan tugas akhir ini;

6. Kepada sahabat penulis Nabilla Farah Quraisyta, S.H., M.H., yang mau menjadi teman berdiskusi, memberikan semangat, menghibur penulis selama proses kepenulisan tugas akhir ini, semoga kelak saya dapat mengikuti jejak anda sebagai seorang Advokat dan Akademisi Hukum;
7. Kepada para senior Advokat di Agustian Siagian Law Firm yaitu: Agustian Anggi Siagian, S.H., Abd. Basid, S.H., Yunizar W. Tristanto, S.H., Dimas Fandikha Satria, S.H., Ifa Al-Mukaromah, S.H., yang senantiasa memberikan dorongan motivasi serta memberikan semangat kepada penulis;
8. Kepada semua civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu-ilmu kepada penulis sejak semester satu sampai sekarang;
9. Kepada semua teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Pada intinya penulis bangga pernah merasakan belajar dan berproses bersama teman-teman semua untuk menjadi manusia unggul dan merdeka.

Malang,,

Penulis

Dimas Wahyu Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Cover/Sampul Dalam	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Tugas Akhir	iv
Ungkapan Pribadi / Motto	v
Abstraksi	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kegunaan Penelitian	18
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	24

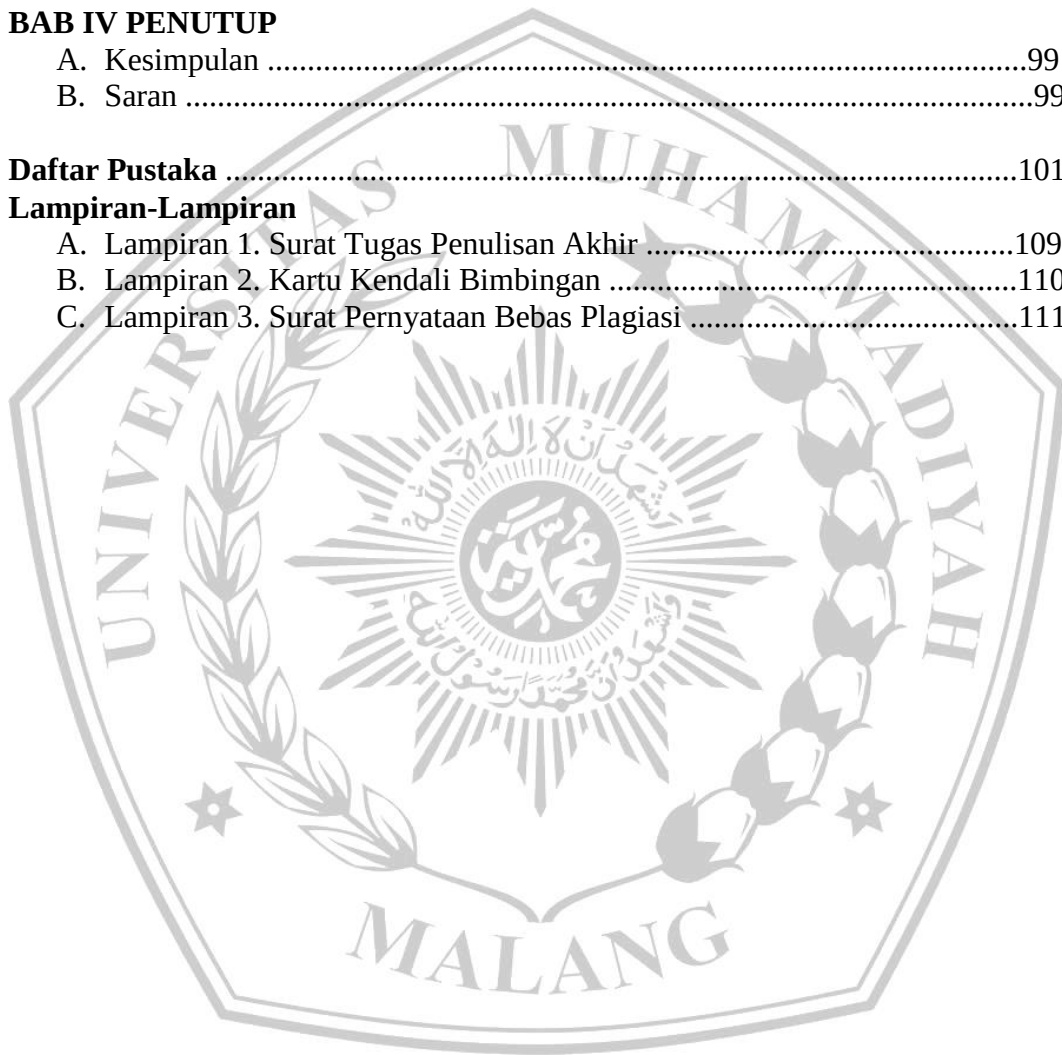
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis	
1. Teori Negara Hukum	28
2. Teori Kepastian Hukum	35
3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	38
B. Tinjauan Konseptual	
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Citizen Lawsuit</i>	42
a. Pengertian <i>Citizen Lawsuit</i>	42
b. Sejarah <i>Citizen Lawsuit</i>	44
c. Karakteristik <i>Citizen Lawsuit</i>	46
d. Unsur-Unsur <i>Citizen Lawsuit</i>	47
2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata	59
a. Pengertian Hukum Acara Perdata	59
b. Sifat-Sifat Hukum Acara Perdata	60
c. Sumber Hukum Acara Perdata	62
3. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan	66
a. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	66
b. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	69
c. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan	72

BAB III PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> di Indonesia	
1. Penggunaan Dasar Hukum Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> Dalam Praktik Peradilan di Indonesia	74

2. Potensi Hilangnya Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia	80
B. Bentuk Pengaturan Tentang Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> Yang Ideal Digunakan di Indonesia	
1. Memasukkan Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> Dalam Rancangan Hukum Acara Perdata	85
2. Formulasi Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia	89
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	99
Daftar Pustaka	101
Lampiran-Lampiran	
A. Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir	109
B. Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan	110
C. Lampiran 3. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	111



DAFTAR TABEL

Tabel	1	Perbandingan <i>Citizen Lawsuit</i> Dengan <i>Class Action</i>	11
Tabel	2	Penelitian Terdahulu	12
Tabel	3	Perbandingan Dasar Hukum <i>Citizen Lawsuit</i> di Amerika Serikat dan India	89



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (ed) Muhammad Fauzan Zarkasi. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *PENGANTAR ILMU HUKUM Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Zainal Asikin. 2018. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. (ed) Ria. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Asmak Ul Hosnah (et.al). 2021. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (ed) Diah Safitri. Depok. PT. RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. (ed) Muchamad Ali Safa'at dan Mohammad Faiz. Jakarta. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Cetakan Pe. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Muhammad Adiguna Bimasakti. 2019. *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*. Yogyakarta. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Ani Purwati. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM: Teori & Praktek*. (ed) Tika Lestari. Surabaya. Jakad Media Publishing.
- A. Sakti Ramdhon Syah R. 2020. *PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA: Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-Undangan Serta Pembentukannya*. (ed) Abd. Kahar Muzakkir. Makasar. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Arba. 2019. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. (ed) Tarmizi. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2009. *PANDUAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. (ed) A. Patra M. Zen. Agustinus Edy Kristianto. Jakarta. YLBHI dan PSHK.
- Isrok dan Rizki Emil Birham. 2010. *Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*. Malang. Universitas Brawijaya Press.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok. Rajawali Press.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Edisi-1, C. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Muhammad Shohibul Itmam. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. (ed) NLi Team. Cirebon. Penerbit Nusa Litera Inspirasi..
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *MODUL: Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe. Unimal Press.
- Ronald S. Lumbuun. 2011. *Perma RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. (ed) Petrus Barus. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.
- Mahkamah Agung RI. 2009. *LAPORAN PENELITIAN: Class Action & Citizen Law Suit*. Jakarta. PUSLITBANG HUKUM.
- Henry P. Panggabean. 2001. *FUNGSI MAHKAMAH AGUNG DALAM PRAKTIK SEHARI-HARI: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara Dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Penemuan Hukum*. Yogyakarta. PT. Citra Aditya Bakti.
- Itmam, Muhammad Shohibul. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by NLi Team. Cetakan Pe. Cirebon: Penerbit Nusa Litera Inspirasi, 2021.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2019.

Fajlurrahman Jurdi. *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*. Edited by Muhammad Fauzan Zarkasi. Cetakan ke. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.

Endang Hadrian, Lukman Hakim. *HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2020.

Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo. *Bab-Bab Penemuan Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Laila M. Rasyid, Herinawati. *MODUL: Pengantar Hukum Acara Perdata*. Cetakan Ke. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

MAHKAMAH AGUNG RI. *CLASS ACTION & CITIZEN LAW SUIT LAPORAN PENELITIAN*. Jakarta: PUSLITBANG HUKUM, 2009.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *PANDUAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Edited by A. Patra M. Zen, Agustinus Edy Kristianto. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2009.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Edited by Eriyanto. Cetakan Pe. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Qamar Nurul, Farah Syah Rezah. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Kahar Muzakkir. Cetakan Pe. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

R., A. Sakti Ramdhon Syah. *PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA: Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-Undangan Serta Pembentukannya*. Edited by Abd. Kahar Muzakkir. Cetakan Pe. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Jurnal / Makalah / Tesis / Skripsi:

Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia. "Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2015): 19–36.

Ahmad Safar, Harjono. "Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Kemacetan Di DKI Jakarta (Studi Kasus Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst)." *VERSTEK: Jurnal Hukum Acara* Vol. 5, No. 1 (2017): 77–87.

Arba. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Edited by Tarmizi. Cetakan Pe. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019.

- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Edited by Ria. Edisi Pert. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Edited by Diah Safitri. Cetakan Pe. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia' Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembaharuan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM." (2011): 1–17. https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
- Atang Hermawan Usman. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 26–53. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74>.
- CRS. "Pengadilan Sahkan Gugatan Model Citizen Lawsuit." Accessed March 16, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-sahkan-gugatan-model-icitizen-law-suiti--hol15494>.
- Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, H. Dedi Candra Wijaya, and Orpa Lintin. "Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)." *Jurnal IKAMAKUM* 2, no. 1 (2022): 587–600.
- Djafar, Wahyudi. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 7, No. 5 (2016): 151.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan Progam Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya* Vol. 5, No. 1 (2019): 88–100.
- Faradina Naviah. "Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *VERSTEK: Jurnal Hukum Acara* 1, no. 3 (2013): 12. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38815/25693>.
- Ferry Irawan Febriansyah. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Permasalahan Hukum dan Pembangunan: Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220–229. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>.
- Hanafi, Muhammad Fikri, Firdaus, Sunny Ummul. "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 79–83. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/192>.

- Herowati Poesoko. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 215–137. <https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/20>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. Universitas Diponegoro. Vol. 1, no. 1 (2019): 13–22.
- Kaunang.(et.al), Angela Christina Natalia. "Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum* Vol. 10, no. 3 (2022): 1–12.
- Khathryna Ihcent Pelealu. "Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi." *Lex Administratum* Vol. 3, No. 7 (2015): 106–115.
- Kurniawan, Rizky Ramadhani. "Urgensi Pengaturan Citizen Lawsuit Terhadap Permasalahan Lingkungan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Bencana Asap Tahunan Di Provinsi Riau)." Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6, No. 3 (2017): 421.
- Nugroho, W S, R Harjiyatni, and S Rahardja. "Gugatan Warga Melalui Citizen Lawsuit Pada Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Konsep E|Ekokarsi Tinjauan Putusan MA No. 3555 Kpdt 2018." *Kajian Hasil Penelitian Hukum, E-Journal Universitas Janabadra* Vol. 4, No. 1 (2020): 713–735.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 2, No. 1 (2021): 1–20.
- Nurmedina, Listyalaras. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Simbur Cahaya* Vol. 28, No. 2 (2021): 245–264.
- Pattinasarany, Yohanes. "Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Daerah." *REFLEKSI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 2 (2022): 203–224.
- Pratami, Ni Luh Ayu Desi Putri. "Karakteristik Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Dan Perbandingannya Dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)." *Kertha Wicara* Vol. 06, No. 4 (2017): 1–6.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No. 2 (2016): 194.

Rai Mantili. “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda.” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmu Hukum*. 4, no. 2 (2019): 298–321.

Salam, Syukron. “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa.” *NURANI HUKUM: Journal of Legal Studies* Vol. 1, No. 1 (2018): 33–44.

Sharaningtyas, Yustina Niken. “Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat.” *Kertha Patrika* Vol. 38, No. 1 (2016): 33–50.

Sihombing, Eka N.A.M. “MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 16, No. 1 (2016): 99–100.

Sri Redjeki Slamet. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi.” *Jurnal Lex Jurnalica*, Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul Vol. 10, No. 2 (2013): 107–120.

Stefanus Aditya Kebingin. “Kedudukan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia.” Universitas Brawijaya, 2011.

Sugianto, Indro. “KASUS NUNUKAN: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara (Kajian Putusan No.28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat.” In *DICTUM: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, edited by Ahmad Taufik Rizal, 105. Edisi Ke-2. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2004.

Suhaimi. “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal Yustitia Fukultas Hukum Universitas Madura Pamekasan* Vol. 19, No. 2 (2018).

Tektona, Rahmadi Indra. “*Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*” *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 3, No. 11 (2022): 47.

Zulaeha, Mulyani. “Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 3, No. 1 (2017): 87–106.

Internet:

CRS. Pengadilan Sahkan Gugatan Model Citizen Lawsuit. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-sahkan-gugatan-model-icitizen-law-suiti--hol15494>. Diakses tanggal 16 Maret 2023.

HRS. *Gugatan CLS Kenaikan Harga BBM Kandas Karena Notifikasi*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-cls-kenaikan-harga-bbm-kandas-karena-notifikasi-lt52fd0499e4ec3/>. Diakses tanggal 16 Maret 2023.

Clean Air Act, n.d. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-8160/pdf/COMPS-8160.pdf>.

Comprehensive Environmental Response, Compensation, And Liability Act (CERCLA)., 1980. <https://www.enviro.wiki/images/c/c5/CERCLA.pdf>.

Federal Water Pollution Control Act, 2002. <https://www.epa.gov/sites/default/files/2017-08/documents/federal-water-pollution-control-act-508full.pdf>.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia., n.d.

The Environment (Protection) Act, No. 29 of 1986., 1986. https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4316/1/ep_act_1986.pdf.

The Water (Prevention And Control of Pollution) Act., n.d. [https://maitri.mahaonline.gov.in/pdf/The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974.pdf](https://maitri.mahaonline.gov.in/pdf/The%20Water%20Prevention%20and%20Control%20of%20Pollution%20Act%201974.pdf).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara

Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : DIMAS WAHYU PRATAMA

Nim : 201910110311386

Dengan Judul Skripsi :

"Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang
Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia"

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matang

Cholidah, SH., MH